

PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KEBEBASAN

BERAGAMA DI INDONESIA (*Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur*)

IMANNSYAH, ADDY

Pembimbing : Endang Sayekti, S.H., M. Hum

INDONESIAN AHMADIYAH; QUALITY AND NON DISCRIMINATION

KKB KK-2 TH 11/12 Ima p

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 945 dan undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut relevan dengan instrumen-instrumen hak asasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam undang-undang No.15 Tahun 2005. Dengan pengaturan dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka kebebasan beragama menjadi hak dasar yang juga harus dilindungi oleh negara sebagaimana hak-hak dasar lainnya.

Namun demikian, dalam implementasinya hak-hak ini tidak mudah diwujudkan. Negara seringkali melakukan pelanggaran bahkan penghapusan terhadap perbedaan keyakinan dan agama kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang digunakan negara untuk mengatur hak ini dalam ketentuan ditingkat lokal. Salah satu contohnya adalah SK No.188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur pada Februari 2011. Akibat dari penerbitan SK tersebut, kelompok Ahmadiyah tidak dapat melakukan aktivitas keagamaan sebagaimana biasanya seperti menyebarkan agamanya, menggunakan identitas dan simbol-simbol Ahmadiyah di Mesjid, sekolah dan seterusnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, undang-undang dan instrumen-instrumen hak asasi internasional, khususnya ICCPR/Kovenan Sippol. Objek penelitian adalah SK No.188/94/KPTS/013/2011 yang secara substantif melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Penelitian ini merekomendasikan kepada Jemaah Ahmadiyah baik kapasitasnya sebagai kelompok keagamaan maupun sebagai individu untuk melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana diatur dalam sitem hukum Indonesia misalnya gugatan dipengadilan Tata Usaha Negara atau melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komite Internasional Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Kebebasan beragama, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Persamaan hak dan Non diskriminasi

ABSTRACT

Freedom of Religion has been one of rights guaranteed by the 1945 constitution and law No. 39/1999 concerning Human Rights. This provisions relevant on international human rights instruments such as The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) that was ratified by Indonesia on law No.15/2005. Its was formulated at the Indonesian level in accordance with the provisions must recognise freedom of religion as a fundamental rights that must be protected by state also as anothers.

Although has been guaranteed on all provisions above but the implementation of this rights on often is not always an easy task. The state is often been hijacked by certain groups forcing their own belief to abolish another belief and religion. It should take necessary measures to ensure that the enjoyment of this right at local level provision. For example, SK No.188/94/KPTS/013/2011 Concerning Prohibition on Indonesian Ahmadiyah Activities in East Java was published of Governor of East Java on Februari 2011. Because of SK, Ahmadiyah group would not to do activities as usually such us to spread they believing, to use identity and any Ahmadiyah symbol on mosque, school etc.

This research to analisys the principles of human rights on 1945 constitution, national law level and international human rights instruments specially ICCPR. The object of research is SK No.188/94/KPTS/013/2011 was prohibited Indonesian Ahmadiyah Activities in East Java. The research recommends to take judicial acts in Indonesian administrative court or National and International Human Rights Committee so that the freedom of religion can be fully enjoyed by the Ahmadiyah either as a groups neither as individual.

Key words : Freedom of Religion, Indonesian Ahmadiyah Groups, Equality and Non discrimination